

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran amat penting untuk membangun peradaban bangsa. Pendidikan merupakan sarana efektif dalam meningkatkan kecerdasan warga negara dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar bangsa ini mampu bersaing dalam percaturan global dan mencapai kemandirian di masa mendatang, pemerintah harus memiliki kesadaran politik (political will) yang kuat dalam melakukan reformasi pengelolaan pendidikan. Keberhasilan reformasi dalam pengelolaan pendidikan secara nasional diharapkan akan mampu mendorong keberhasilan reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas akan lahir sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi (Prayitno, 2010:5).

Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, (Oteng Sutisna:1983) mengemukakan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dudung A.

Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menjeaskan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan:(a) Mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi baik local maupun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri (b) Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan baik berbentuk fisik maupun non fisik dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia (c) Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan yang semakin bertambah dan beragam sehingga akhirnya tidak hanya tenaga pengajar yang diperlukan tetapi juga membutuhkan berbagai tenaga kependidikan lainnya seperti pengelola pendidikan, administrator ,planner, supervisor dan juga counsellor. (d) Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas.,(e) Pendidikan dan lembaga pendidikan telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penangana yang lebih serius untuk dapat bersaing sehat,.

Guna mendukung suksesnya sistem desentralisasi dan otonomi dalam pembangunan, pemerintah memberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan adanya otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar dan menengah. Otonomi di sini bermakna bahwa setiap lembaga pendidikan formal

dituntut lebih memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang berbasis pada otonomi daerah atau kemandirian sekolah adalah manajemen berbasis sekolah (MBS). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. Tujuan dari MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan, khususnya disekolah dapat dilakukan melalui partisipasi orang tua siswa terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta berlakunya sistem intensif serta disintensif.

Guna memperbaiki kualitas pembelajaran yang terjadi pada pendidikan dasar dan menengah perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk perlu adanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sekitar. Berkaitan dengan hubungan antara sekolah dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik, perlu adanya suatu lembaga khusus dari masyarakat untuk ikut memberikan perhatian perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat secara bersama. Masyarakat merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan atas keberhasilan pendidikan di sekolah (baik pendidikan dasar maupun menengah).

Untuk mempermudah hubungan antara sekolah dan masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mampu menjadi penghubung, yaitu dewan pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi, dan komite sekolah untuk tingkat satuan pendidikan.

Dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa pengertian Komite Sekolah adalah :

“Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam `rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”.

Selain itu, Keputusan Mendiknas tersebut juga menerangkan bahwa Komite Sekolah mempunyai peran sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (sebagai pengontrol), sebagai mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Sedangkan Tim Pokja School Based Management Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2003:65) mengemukakan bahwa:

“Komite sekolah merupakan lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan output pendidikan.”

Dewan pendidikan dan komite sekolah juga memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Selain komite sekolah, peranan pendidikan akan terwujud apabila dapat direalisasikan dalam suatu lembaga pendidikan khususnya sekolah yang secara formal menyiapkan lulusan yang berkualitas. Keberhasilan proses pendidikan formal disekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah fasilitas sarana prasarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas proses pembelajaran juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Adanya gedung sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas lain seperti tempat duduk, meja, laboratorium, sarana perpustakaan, buku atau alat belajar dan lain-lain adalah sarana yang sangat dibutuhkan untuk sebuah keberhasilan dalam proses pendidikan, semakin lengkap sarana dan prasarana yang tersedia semakin besar juga kemungkinan mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Dalam sarana prasarana memerlukan pengelolaan yang baik dan terperinci, supaya data yang berkenaan dengan fasilitas dapat teridentifikasi dengan baik. Dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana, memerlukan proses mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan peralatan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Selanjutnya, terkait dengan sarana prasarana sekolah, *Kastrat* (2008:16) menyatakan bahwa kondisi sarana fisik pendidikan di Indonesia saat masih jauh dari kata layak, sehingga mempengaruhi semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia. *Elisabeth S.* (2003) menyatakan bahwa: “hingga sekarang ini, sarana prasarana fisik pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai, seperti bangunan sekolah, fasilitas laboratorium dan sebagainya. Padahal sarana fisik ini sangat vital dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kenyataan di lapangan banyak sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak (karena kondisi bangunan sudah tua atau karena kurangnya pemeliharaan). Contohnya pada tanggal 2 Februari 2009 sebuah kelas di Sekolah Dasar Karya Bakti, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, roboh. Peristiwa robohnya bangunan kelas ini terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ([liputan6.com](#)). Tanggal 11 Maret 2009 terjadi penarikan bangku oleh perajin dari SD di Bululawang karena pihak perajin belum menerima uang pembayaran dari sekolah selama tiga tahun, sejak 2006 ([Berita Pendidikan.com](#)).

Kerusakan bangunan sekolah dan kurangnya sarana pendidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak akan merasa tidak nyaman dalam belajar. Sebaliknya jika sarana pendidikan memadai, maka peserta didik akan merasa nyaman dalam belajar, meningkatkan semangat belajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar (Lhani, 2009).

Kenyataan tersebut sudah banyak diberitakan di banyak media massa, misalnya seperti yang di tulis harian Tempo (12 Juli 2010) tentang ambruknya SDN Salagombong, Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, yang sejak 15 tahun silam ambruk, namun belum pernah direnovasi kembali. Selain itu, Headline News/Nusantara/Senin, 26 Juli 2010 10:10 WIB yang dilansir Metrotvnews.com, menyiarkan bahwa: Siswa SMPN 3 Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpaksa belajar di ruangan laboratorium secara bergantian, setelah ambruknya bangunan kelas di sekolah itu. Senada dengan itu, Liputan6 pada 17/02/2010 02:44, menyiarkan bahwa aktivitas belajar mengajar siswa SMP PGRI Sukamakmur di Desa Pabuaran, Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/2), terganggu menyusul ambruknya bangunan sekolah hingga enam siswa terluka.

Informasi-informasi di atas, jelas-jelas menegaskan bahwa jangankan dilihat dari segi kualitas peralatan penunjang pembelajaran, seperti laboratorium beserta peralatan dan bahan-bahan prakteknya, computer dan ICT serta perpustakaan, bangunannya pun masih belum memadai. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian banyak pihak untuk berbuat lebih baik, dalam mewujudkan penyelenggaraan sekolah yang mapan.

Selain itu, implikasi dilapangan, kinerja komite sekolah masih belum optimal sesuai dengan fungsi dan perannya. Hal ini mungkin dikarenakan ketika pembentukan komite sekolah, terlalu tergesa-gesa dan terkadang pembentukan komite sekolah dipilih dari orang yang tidak paham akan pendidikan atau tidak terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan dunia pendidikan.

Asep Suryana (2004:46) dalam jurnal *Administrasi Pendidikan* tentang *Orientasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kreativitas Dewan Sekolah serta Upaya Peningkatan Mutu Sekolah*, mengemukakan bahwa: “komite sekolah seharusnya diisi orang-orang yang mengerti dan memahami tentang pendidikan”. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah terutama dalam menggali dan memberdayakan setiap sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diperankan atau yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat melalui Komite Sekolah, diantaranya yaitu membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi belajar siswa dan membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun meningkatkan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar dan mendukung pemecahan masalah pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum sekolah, mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah untuk melakukan kunjungan ke sekolah yang dinilai berhasil/berkualitas, dan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melaksanakan program belajar di luar kelas/sekolah.

Terkait dengan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji keterlibatan komite sekolah dan pengaruhnya terhadap sekolah melalui suatu

penelitian. Adapun penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada kinerja Komite Sekolah dan kontribusinya terhadap pemenuhan sarana prasarana sekolah, sehingga mendorong terciptanya proses belajar mengajar efektif. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan, mengungkap tentang: “Kontribusi Kinerja Komite Sekolah terhadap Pemenuhan Kelengkapan Sarana Pembelajaran di SMP Selaawi Kabupaten Garut”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan latar belakang serta identifikasi masalah seperti telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran di SMP Selaawi Kabupaten Garut?”

Untuk memudahkan penulis dalam mengupasnya, masalah di atas kemudian diuraikan kembali dalam bentuk pertanyaan penelitian seperti berikut ini:

1. Bagaimana kinerja Komite Sekolah SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?
3. Berapa besar kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana

pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut. Sedangkan secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kinerja Komite Sekolah SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?
2. Mengetahui kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?
3. Mengetahui besar kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diperoleh informasi terkait kinerja komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya, serta kondisi sarana pembelajaran di SMP. Selain itu, juga diperoleh informasi mengenai pengaruh kinerja komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya, terhadap pemenuhan sarana prasarana pembelajaran.

Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, bahan kajian, serta sumbangan pemikiran dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas input, proses dan kualitas hasil pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, diantaranya yaitu:

- a. Memberikan gambaran umum tentang bagaimana kinerja yang dilakukan komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya
- b. Mapat membantu komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerjanya lebih meningkat
- c. Terkait dengan kinerja komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya, kita dapat melihat berpengaruh tidaknya keberadaan lembaga tersebut terhadap perkembangan sekolah, baik berupa pemenuhan sarana pembelajaran, atau pun pendukung lainnya.

E. Asumsi Dasar

Dalam upaya mengupas bagaimana kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut yang merupakan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis membuat titik tolak berpikir yang kemudian dikemukakan berupa asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Komite Sekolah merupakan lembaga yang mewadahi keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengelola sekolah, sehingga para stakeholder pendidikan dapat berperan secara maksimal dan sekolah mamu memberikan yang terbaik bagi *customer*-nya, (Suryana, 2004:46-79)
2. Kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa

jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan simamora dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa fisik/material maupun non fisik maupun non material, (Simamora:2000)

3. Sarana prasarana belajar adalah segala sesuatu yang menunjang proses belajar mengajar baik berupa material, tempat, kondisi dan aspek-aspek lain yang turut serta berpengaruh, sehingga pelaksanaan belajar bisa menjadi lebih baik, (Mudhofir (1992:13)
4. Kinerja Komite Sekolah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh anggota komite dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Komite merupakan ujung tombak dalam menggalang keterlibatan masyarakat terhadap dunia pendidikan di tingkat sekolah, sehingga kinerja komite yang baik akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan pemenuhan sarana prasarana sekolah.
5. Sarana pembelajaran di sekolah merupakan keterdukungan kondisi dan alat bantu perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran sehingga berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif, menunjukkan mutu atau kualitas pembelajaran yang baik, dan pembelajaran yang baik berdampak terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Semakin banyak tujuan pembelajaran tercapai, menunjukkan semakin baik mutu hasil pembelajaran, dan akhirnya membawa perubahan baik dari segi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap dalam diri peserta didik yang bermuara pada kualitas pendidikan.

F. Hipotesis Penelitian

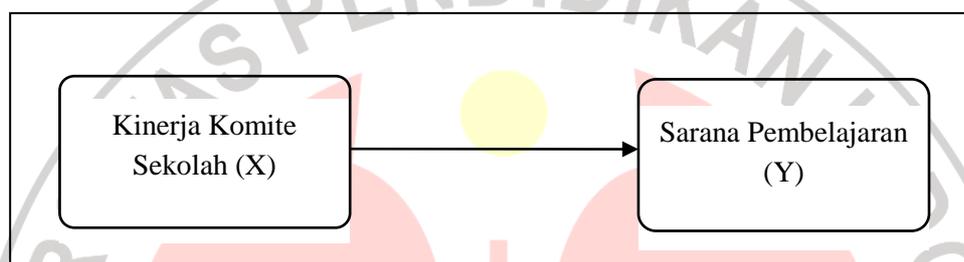
Hipotesis merupakan jawaban penelitian sementara kebenarannya masih perlu dibuktikan. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Suharsini Arikunto (1998:67) menyatakan bahwa “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan pendidikan, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan pernyataan tersebut, Untuk menentukan arah yang lebih jelas dalam mengupas masalah, kemudian dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “terdapat kontribusi positif dan signifikan pada variable kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut”.

Variabel dalam penelitian ini dibedakan ke dalam dua kategori yaitu: Variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependent (terikat), sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel bebas dalam penelitian ini, adalah: Kinerja Komite Sekolah (X_1), yaitu kemampuan Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*), Badan Pendukung (*Supporting Agency*), Badan Pengontrol (*Controlling Agency*) dan Badan Penghubung (*Mediator Agency*) untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi sekolah yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan sarana prasarana pembelajaran sekolah.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sarana prasarana pembelajaran di sekolah (Y), yaitu tingkat ketercapaian dan ketersediaan atau pemenuhan sarana pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar disekolah, yaitu berupa alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran.

Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini, dapat digambarkan melalui bagan 1.01 berikut ini:



Bagan 1.01

Keterkaitan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan lancar jika menggunakan metode penelitian. Demikian halnya dengan penelitian ini, juga dipergunakan suatu metode. Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain analitis korelasional. Menurut Notoatmodjo (2002), *correlation study* merupakan suatu metode penelitian atau penelaahan hubungan antara dua variabel atau lebih, pada suatu situasi atau sekelompok subjek tertentu. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh

makna yang lebih mendalam tentang kontribusi kinerja Komite Sekolah terhadap pemenuhan sarana prasarana sekolah.

Desain penelitian yang digunakan adalah analitis korelasional, yang ditujukan untuk mengkaji dan mengidentifikasi dampak kinerja Komite Sekolah dan pemenuhan sarana prasarana sekolah. Kinerja Komite Sekolah tersebut mencakup hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*), Badan Pendukung (*Supportinng Agency*), Badan Pengontrol (*Controlling Agency*) dan Badan Penghubung (*Mediator Agency*). Sarana prasarana sekolah yang dimaksud ditinjau berdasarkan ketercapaian dan ketersediaan berbagai sarana pendukung untuk pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di SMP.

G. Definisi operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul, dan ruang lingkup masalah yang diteliti maka terlebih dahulu penulis menjelaskan definisi istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi kinerja komite sekolah

Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992:345) mengemukakan bahwa "kontribusi adalah masukan yang sangat berarti dari satu aspek kepada aspek lainnya".

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu Sedangkan Tim Pokja School Based Management Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2003:65) mengemukakan bahwa:

Komite sekolah merupakan lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan output pendidikan

Berdasarkan konsep tersebut, maka kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masukan yang sangat berarti dari Komite sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung terhadap pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

2. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Dengan sarana yang memadai mungkin berlangsungnya proses belajar mengajar yang kondusif dan dapat mencapai tujuan yang maksimal. Dengan sarana pembelajaran yang kurang memadai otomatis proses belajar mengajar tidak akan berlangsung secara efektif dan maksimal sehingga tujuan pembelajaranpun sulit untuk terpenuhi target.

Sarana pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar disekolah, yaitu berupa alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran.

H. lokasi populasi dan sampel penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini berada di Sekolah Menengah Pertama se Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

2. Populasi dan sampel

Winarno Surahkmad (1992:93), mengemukakan bahwa “Populasi adalah sekumpulan objek, manusia, gedung, peristiwa, dan benda-benda”. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, yang berjumlah sebanyak 120 orang dan tersebar di tiga sekolah.

Sampel penelitian adalah sebagian dan populasi yang diambil sebagai data dan dapat dianggap mewakili seluruh populasi (Nasution,1982:29). Besar kecilnya sampel akan sangat tergantung dari jumlah populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Guru di SMP Selaawi Kabupaten Garut yang besarnya ditentukan sesuai dengan metodologi dalam Bab III.